

NOMOR 6 TAHUN 2016 KABUPATEN PURWOREJO PERATURAN DAERAH ATAS
PERUBAHAN KEDUA

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 14 TAHUN 2018, LD 2018/NO.14 SETDA KAB.
PURWOREJO 14 HLM

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

- Abstrak : – Dalam rangka memberikan dasar hukum dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk melengkapi kekurangan dan mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan perubahan yang kedua ;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengubah Pasal 1, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 29, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, terdiri pasal I yang memuat materi perubahan, pasal II Penutup

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2018;
– Terdapat 10 pasal diubah ;
– Penjelasan 3 Hlm